

SKRIPSI

PENGARUH DEMAND SIDE TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

MARIA VANIA DEWI KUSUMAWARDANI
A011201032

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 17 Juni 2025

Pembimbing 1



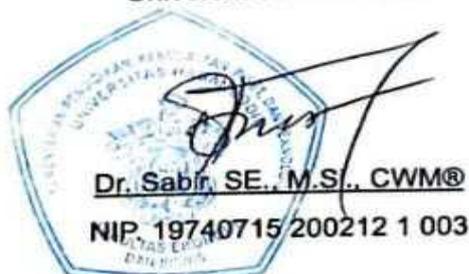
Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®
NIP. 196401061988032001

Pembimbing 2



Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF.,
NIP. 196608111991032001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.S., CWM®
NIP. 19740715/200212 1 003



SKRIPSI

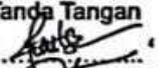
**PENGARUH DEMAND SIDE TERHADAP PENGANGGURAN
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

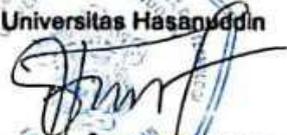
**MARIA VANIA DEWI KUSUMAWARDANI
A011201032**

Telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2025 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Fatmawati, SE., M.SI., CWM®	Ketua	1. 
2	Dr. Sri Undal Nurbayani, SE., M.SI., CPF..	Sekretaris	2. 
3	Dr. Madris, DPS., M.SI., CWM	Anggota	3.
4	Akbar Mandela A. Y., SE., M.SI	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Sabir, SE., M.SI., CWM®
NIP. 197407152002121003

..

..

iv

..

PERNYATAAN KEASLIAN



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : MARIA VANIA DEWI KUSUMAWARDANI

Nomor Induk : A011201032

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pengaruh Demand Side Terhadap Pengangguran di Kota Makassar adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Juni 2025

Yang Menyatakan

Maria Vania Dewi Kusumawardani

A011201032



ABSTRAK

PENGARUH *DEMAND SIDE* TERHADAP PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

Maria Vania Dewi Kusumawardani

Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®

Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF..

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh demand side terhadap pengangguran di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang Mempengaruhi pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Website Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2004 – 2024 di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negative terhadap pengangguran, sedangkan TPAK, Mutu Sumber Daya Manusia, dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menurunkan pengangguran di Kota Makassar, perlu adanya kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memastikan bahwa kenaikan upah minimum sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja. Selain itu, perhatian terhadap kualitas mutu sumber daya manusia dan pelatihan keterampilan juga penting agar RLS berdampak nyata dalam menurunkan pengangguran. Hasil yang menunjukkan bahwa variabel TPAK dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran bukan berarti peran keduanya dapat diabaikan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, TPAK, Mutu Sumber Daya Manusia, Inflasi, dan Pengangguran



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Teoritis	18
2.1.1 Pengangguran	18
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	22
2.1.3 Upah Minimum	25
2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	28
2.1.5 Mutu Sumber Daya Manusia	31
2.1.6 Inflasi.....	33
2.2 Hubungan Antara Variabel.....	38
2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran	38
2.2.2 Hubungan Antara Upah Minimum dengan Pengangguran	39
2.2.3 Hubungan Antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan Pengangguran	39
2.2.4 Hubungan Antara Mutu Sumber Daya Manusia dengan Pengangguran	40
2.2.5 Hubungan Antara Inflasi dengan Pengangguran	40
2.3 Tinjauan Empiris.....	40
2.4 Kerangka Pikir	44
2.5 Hipotesis Penelitian	45
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	
3.1 Lokasi Penelitian	
3.2 Populasi dan Sampel.....	
3.3 Jenis dan Sumber Data	
Metode Pengumpulan Data	
Model Analisis.....	
Analisis Regresi Berganda	



3.6	Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.6.1	Uji Normalitas	
3.6.2	Uji Multikolinearitas	
3.6.3	Uji Autokorelasi	
3.6.4	Uji Heteroskedastisitas	
3.7	Uji Hipotesis	
3.7.1	Uji F (simultan).....	
3.7.2	Uji T (Parsial)	
3.7.3	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	
3.8	Definisi Operasional.....	
BAB IV.....		
HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran umum lokasi penelitian.....	
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian	
4.2.1	Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kota Makassar	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar	
4.2.3	Perkembangan Upah Minimum di Kota Makassar	
4.2.4	Perkembangan TPAK di Kota Makassar	
4.2.5	Perkembangan Mutu Sumber Daya Manusia di Kota Makassar	
4.2.6	Perkembangan Inflasi di Kota Makassar.....	Error! Bookmark not defined.
4.3	Uji Asumsi Klasik	
4.3.1	Uji Normalitas	
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	
4.3.3	Uji Autokorelasi.....	
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas	
4.4	Hasil Regresi Dan Uji Hipotesis	
4.4.1	Hasil Estimasi Variabel Penelitian.....	
4.4.2	Uji T (Parsial).....	
4.4.3	Uji F (simultan)	
4.4.4	Koefisien Determinasi (R-Squared)	
4.5	Pembahasan Hasil Estimasi Penelitian.....	
	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran ...	Error! Bookmark not defined.
	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran	



4.5.3	Pengaruh TPAK Terhadap Pengangguran
4.5.4	Pengaruh RLS Terhadap Pengangguran
4.5.5	Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran.....
BAB V
PENUTUP
5.1	Kesimpulan.....
5.2	Saran.....
DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, UMK, TPAK, RLS, dan Inflasi Kota Makassar....7	7
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran di Kota Makassar Tahun 2004-2024.....47	47
Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2004-2024.....49	49
Tabel 4.3 Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2004-2024.....51	51
Tabel 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar Tahun 2004-202453	53
Tabel 4.5 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Makassar Tahun 2004-2024.....54	54
Tabel 4.6 Tingkat Inflasi di Kota Makassar Tahun 2004-2024.....56	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....58	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokolerasi.....59	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Heterokedastisitas.....60	60
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda.....60	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F).....63	63
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....64	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Tingkat Pengangguran di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2024.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menjadi tantangan besar bagi perekonomian setiap negara. Negara-negara berkembang umumnya menghadapi berbagai masalah, mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga sektor-sektor lainnya, termasuk masalah ketenagakerjaan. Dalam proses pembangunan ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran menjadi masalah yang kompleks dan lebih serius dibandingkan perubahan distribusi pendapatan yang tidak menguntungkan penduduk berpenghasilan rendah. Selama beberapa dekade terakhir, kondisi di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja dengan kecepatan yang sebanding dengan pertumbuhan penduduk. (Syam, 2015)

Indonesia memiliki potensi pasar yang signifikan dari segi ketersediaan tenaga kerja. Dengan populasi yang besar, Indonesia seharusnya mampu menggerakkan perekonomian melalui sumber daya manusia yang melimpah. Namun, pada kenyataannya, jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar belum menjadi aset potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Sebaliknya, hal ini justru menjadi beban bagi pembangunan negara. Meskipun demikian, jika pertumbuhan populasi yang cepat mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, maka hal ini bisa merangsang pertumbuhan ekonomi.

liknya, jika pertumbuhan populasi yang cepat tidak menghasilkan tenaga yang potensial, maka hal ini akan menghambat perkembangan ekonomi (Ira, 2018). Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu isu serius yang perlu



ditangani di sebuah negara atau wilayah. Hal ini sering terjadi karena banyaknya jumlah tenaga kerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan, yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Sebuah angkatan kerja yang besar memerlukan jumlah lapangan pekerjaan yang sesuai, namun kenyataannya, lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sebanyak jumlah tenaga kerja yang ada. Ketidakseimbangan antara meningkatnya jumlah tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan akan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi (Fadilah, P. 2018).

Pengangguran adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Masalah pengangguran tampaknya tidak pernah berakhir. Penyebab pengangguran sangat beragam dan tampaknya sulit untuk diselesaikan sepenuhnya, menjadikannya masalah serius bagi setiap negara. Pemerintah terus memperbarui berbagai kebijakan untuk menangani masalah ini. Baik negara maju maupun negara berkembang menghadapi masalah pengangguran, dengan perbedaan bahwa negara berkembang biasanya tidak mampu memberikan tunjangan kepada warganya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan bagi warganya yang menganggur (Hartanto, 2017). Pengangguran dari sisi ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pengangguran juga membebani ekonomi negara, ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, pengangguran juga menjadi penyebab ketidakstabilan politik atau negara, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap negara selalu berupaya menjaga tingkat pengangguran tetap

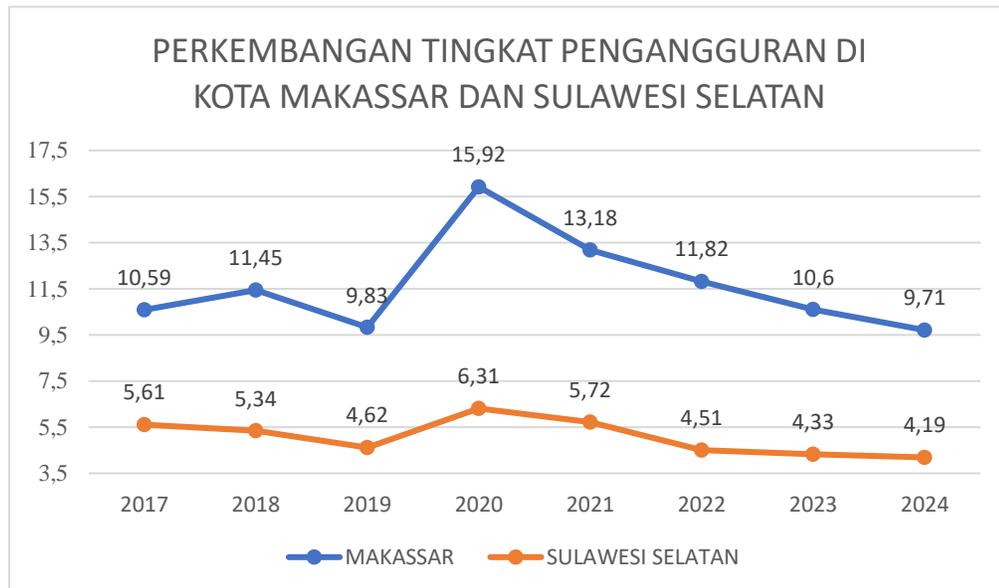


rendah. Namun, dalam kenyataannya, pengangguran tetap muncul dalam perekonomian, meskipun kondisi ekonomi sedang baik. Jika pengangguran tidak segera ditangani, hal ini dapat memicu kerawanan sosial dan berpotensi menyebabkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2015).

Tingkat pengangguran yang tinggi sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, karena pengangguran merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, pengangguran mencerminkan ketidakmampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia dan terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil daripada jumlah pencari kerja, ketidakcocokan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja. Di bawah ini adalah grafik tingkat pengangguran di Kota Makassar selama periode tahun 2017-2024.



Gambar 1.1 Presentase Tingkat Pengangguran di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2024



Sumber Data Diolah: BPS Sulsel, 2024

Pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pengangguran di Kota Makassar mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Dari grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, Tingkat pengangguran Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Kota Makassar meningkat secara signifikan hingga mencapai 15,92 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan

terpaksa tutup serta terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara il. Pada tahun-tahun berikutnya, data menunjukkan adanya tren penurunan t pengangguran yang signifikan selama empat tahun berturut-turut. Hingga



tahun 2024, tingkat pengangguran di Kota Makassar tercatat sebesar 9,71 persen. Meskipun terdapat kemajuan dalam menekan angka pengangguran, Kota Makassar masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengatasi permasalahan ini, terutama jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Masalah pengangguran dapat dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi. Adapun indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Mutu Sumber Daya Manusia, Inflasi.

Dari segi factor Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi, semakin besar peluang bagi perusahaan untuk berkembang serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan PDRB diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, karena bertambahnya PDRB berpotensi meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan PDRB di suatu daerah dapat berhubungan dengan meningkatnya angka pengangguran. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik (Muslim, 2014). Selanjutnya Upah Minimum yang menjadi faktor pendorong bagi penganggur untuk segera mencari pekerjaan. Keinginan seseorang untuk bekerja dipengaruhi oleh besaran upah yang akan diterimanya. Menurut Kaufman dan Hotchkis (1999) skan bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan maka semakin pengaruhi tingginya angka pengangguran. Hal ini bisa terjadi karena semakin



tinggi gaji maka semakin tinggi pula biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan. Akibatnya, perusahaan meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi jumlah karyawan yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran.

Faktor selanjutnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan tingginya Angkatan kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur. Kondisi angkatan kerja dapat membaik jika peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan tingkat partisipasi penduduk yang bekerja. Namun sebaliknya jika bertambahnya angkatan kerja yang belum bekerja tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan, maka hal ini akan berdampak pada menurunnya penyerapan angkatan kerja yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Pada akhirnya semakin bertambahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan akan meningkatkan pengangguran, itu disebabkan karena lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung semua angkatan kerja yang ada.

Mutu Sumber Daya Manusia adalah salah satu factor yang menyebabkan pengangguran. Pekerja atau sumber daya manusia memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia adalah faktor produksi yang utama dan paling penting dibandingkan faktor produksi lainnya. Kualitas sumber daya manusia menentukan daya saing individu di pasar tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin besar pula

intaan atas tenaga kerja tersebut, karena kualitas yang baik seringkali terkait an produktivitas yang tinggi. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat



dilakukan melalui Mutu Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pendidikan mencerminkan tingkat kecerdasan atau pencapaian Pendidikan formal masyarakat di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitasnya dalam bekerja.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengangguran adalah Inflasi. Inflasi berarti kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Setiap tahun, tingkat inflasi yang terjadi dapat meningkatkan jumlah pengangguran serta memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di wilayah dengan kondisi ekonomi yang baik, tingkat inflasi biasanya rendah. Namun, ada juga daerah yang mengalami inflasi sangat tinggi yang disebut hiperinflasi. Jika suatu wilayah terkena hiperinflasi, jumlah pengangguran di daerah tersebut cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga-harga di berbagai sektor, yang mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Akibatnya, tingkat pengangguran yang tinggi menjadi sulit dihindari, dan ekonomi pun mengalami resesi.



Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, UMK, TPAK, RLS, dan Inflasi di Kota Makassar Periode Tahun 2017-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Upah Minimum	TPAK (%)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Inflasi (%)
2017	8.23	Rp2.504.500	55.23	11.08	4.48
2018	8.42	Rp2.722.642	59.49	11.09	3.48
2019	8.79	Rp2.941.270	58.86	11.20	2.43
2020	-1.27	Rp3.191.572	58.05	11.21	2.13
2021	4.47	Rp3.255.403	59.7	11.43	2.26
2022	5.4	Rp3.294.962	59.27	11.55	5.09
2023	5.31	Rp3.523.181	58.72	11.56	2.89
2024	5.26	Rp3.643.321	62.04	11.57	1.77

Sumber Data: BPS Makassar dan Disnaker Makassar, 2024

Berdasarkan dari Tabel 1.1 diatas Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar mengalami fluktuasi setiap tahunnya. sepanjang tahun 2017 hingga 2019 nilai tambah output pertumbuhan ekonomi Kota Makassar masih menunjukkan kinerja positif karena secara konsisten mencatat angka pertumbuhan sebagai berikut pada tahun 2017 (8,23%), tahun 2018 (8,42%), tahun 2019 (8,79%). Namun saat Covid-19 mulai masuk ke Indonesia tahun 2020 perekonomian Kota Makassar termasuk terkoreksi sangat parah yaitu pada Tahun 2020 (-1,27%). Di awal tahun 2021, nampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali sehingga laju pertumbuhan ekonomi mulai bangkit pada posisi 4,47%, meski situasi belum sepenuhnya normal.



kemudian berdasarkan tabel diatas perkembangan inflasi di Kota Makassar relatif dapat dikendalikan berdasarkan data inflasi bersifat fluktuatif. Namun,

pada tahun 2017 inflasi mengalami peningkatan yakni, pada 4,48%. Inflasi dipicu oleh naiknya harga harga komoditi yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 2,68 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,17 persen. Akan tetapi, pada tahun 2021 inflasi menjadi rendah sebesar 2,26%. Inflasi yang terjadi pada tahun 2021 yang rendah dipicu oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, adalah tingginya angka pengangguran. Pada tahun 2024, Makassar mencatat tingkat pengangguran tertinggi di antara kota-kota di Pulau Sulawesi, yaitu sebesar 9,71%. Meskipun upah minimum di kota ini terus meningkat setiap tahun, mencapai Rp3.643.321 pada tahun 2024, serta pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan inflasi yang relatif stabil, dan rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan, angka pengangguran tetap tinggi. Peningkatan dalam indikator-indikator tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk menurunkan tingkat pengangguran di Makassar. Namun, kenyataannya, tingkat pengangguran di Makassar dari tahun 2004 hingga 2024 justru terus meningkat.

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang ini, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk mengangkat judul penelitian:

“Pengaruh *Demand Side* Terhadap Pengangguran di Kota Makassar”



1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
3. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
4. Apakah Mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?
5. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pengangguran di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengangguran di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap pengangguran di Kota Makassar
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pengangguran di Kota Makassar



4. Untuk mengetahui pengaruh Mutu Sumber Daya Manusia terhadap pengangguran di Kota Makassar

5. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pengangguran di Kota Makassar

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Mutu Sumber Daya Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tolak ukur bagi pemerintah Kota Makassar sebagai pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang berguna sebagai bahan rekomendasi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan masalah pengangguran di Kota Makassar.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangguran akibat pengaruh dari demand side di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan realitas yang dihadapi tidak hanya oleh negara-negara berkembang, tetapi juga oleh negara-negara maju. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur (Efrianti, 2021). Pengangguran menjadi masalah ekonomi karena ketika tingkat pengangguran meningkat, negara kehilangan potensi barang dan jasa yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh para penganggur (Syahputra, 2019). Menurut Sukirno (2011), pengangguran adalah masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memiliki beberapa dampak negatif terhadap ekonomi, politik, dan sosial. Misalnya, tingginya angka pengangguran dapat mengurangi produktivitas dan pendapatan masyarakat serta menyebabkan berbagai masalah sosial. Menurut Mankiw (2006), pengangguran mencakup orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Tingkat pengangguran adalah persentase yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja dalam periode tertentu. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja menyebabkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap. Pengangguran juga bisa

ka angkatan kerja tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh
ian.



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak, atau sedang mempersiapkan usaha mandiri. Pengangguran biasanya terjadi bukan hanya karena keinginan pribadi (sukarela) tetapi juga karena situasi yang memaksa (terpaksa). Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyak angkatan kerja yang seharusnya produktif menjadi pengangguran. Dengan kondisi Indonesia saat ini, tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk juga menyebabkan jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Jumlah pengangguran dan angkatan kerja menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus dibiayai. termasuk dalam proses pembangunan, artinya angka pengangguran dan angkatan kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk yang mampu menggerakkan proses perekonomian (Fatmawati, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah setiap orang dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkannya. Kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan pelamar kerja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, serta jumlah pencari kerja yang melebihi jumlah lapangan kerja yang tersedia, sehingga hanya sebagian kecil pelamar yang bisa diterima bekerja, sementara sisanya harus terus berusaha mencari pekerjaan di tempat lain.

Pengangguran merupakan isu yang dihadapi oleh berbagai negara, oleh karena itu, penanganan pengangguran selalu menjadi bagian dari pembahasan rencana pembangunan ekonomi suatu negara, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat



pengangguran. Menurut Sukirno (2013) dalam membedakan jenis-jenis pengangguran terdapat dua cara menggolongkannya berdasarkan penyebab dan cirinya. Berikut merupakan jenis pengangguran berdasarkan cirinya:

1. Pengangguran Terbuka.

Pengangguran Terbuka ini terjadi ketika pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi penambahan jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak individu yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi penganggur sepanjang waktu. Kondisi ini disebut sebagai pengangguran terbuka. Selain itu, kemajuan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan penurunan pertumbuhan industri juga berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran terbuka.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini umumnya terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan bergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran perusahaan, jenis mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang, sering kali ditemukan bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut secara efisien. Kelebihan tenaga kerja ini disebut pengangguran tersembunyi.

3. Pengangguran Bermusim

Pengangguran Bermusim ini terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Penyebab utama pengangguran ini adalah faktor alam, seperti musim hujan,



yang menghalangi para petani dan nelayan untuk bekerja. Jika mereka tidak memiliki pekerjaan alternatif selama periode ini, mereka akan menganggur. Jenis pengangguran ini dikenal sebagai pengangguran bermusim.

4. Pengangguran Setengah Menganggur

Setengah Menganggur ini umumnya terjadi pada negara berkembang, urbanisasi dari desa ke kota meningkat sangat pesat. Sehingga akibatnya tidak semua orang yang ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu dan ada juga yang tidak menganggur tetapi tidak juga bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih sedikit dari jam kerja normal. Seorang pekerja bekerja jauh lebih sedikit dari jam kerja normal dapat disebut sebagai setengah menganggur

Selanjutnya, berikut merupakan jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran jenis ini bersifat sementara dan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh faktor waktu, informasi, atau kondisi geografis/jarak antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Mereka yang termasuk dalam kategori pengangguran sementara umumnya rela menganggur (voluntary unemployment) untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran friksional bukanlah hasil dari ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan, melainkan dari keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.



2. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan stabil terkadang permintaan agregat meningkat, mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi. Ini mengakibatkan lebih banyak pekerja yang dipekerjakan dan pengangguran berkurang. Namun, di waktu lain, permintaan agregat bisa menurun drastis. Misalnya, di negara-negara penghasil bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas. Penurunan ini berdampak pada perusahaan-perusahaan terkait, yang juga akan mengalami penurunan permintaan terhadap produk mereka. Penurunan permintaan agregat ini menyebabkan perusahaan-perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau menutup usahanya, sehingga pengangguran meningkat. Pengangguran yang muncul akibat kondisi ini disebut pengangguran siklikal.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran ini terjadi karena perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan tenaga kerja yang berbeda, namun pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi terjadi ketika Sumber Daya Manusia digantikan oleh mesin dan kemajuan teknologi dalam perkembangan zaman, pergantian ini dilakukan dalam proses produksi suatu komoditas



artumbuhan Ekonomi

Menurut Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan beragam jenis barang ekonomi bagi penduduknya (Todaro, 2011). Pertumbuhan ekonomi juga berfungsi sebagai indikator kinerja yang mencerminkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Indikator ini memiliki peran penting bagi suatu daerah karena dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai keberhasilan pembangunan, sekaligus menjadi dasar untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Secara konvensional, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menghitung persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mencerminkan total pengeluaran dalam suatu perekonomian untuk berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi dalam periode tertentu, serta total pendapatan yang diperoleh dari produksi tersebut. Menurut Mankiw, PDB merupakan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu (Wahyudi, 2010). Pada tingkat regional, pengukuran dilakukan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai barang dan jasa dalam PDRB dipengaruhi oleh jumlah dan harga barang serta jasa yang diproduksi. Untuk menghilangkan dampak kenaikan harga, pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB dengan harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di suatu wilayah atau jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh unit ekonomi dalam wilayah

Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, PDRB as PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.



PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga dari satu tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek krusial dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, semakin besar pula dampak positif yang diberikan terhadap pembangunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan, karena perkembangan ekonomi akan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa (Hasibuan, 2023)

Ada berbagai teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, di antaranya:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Ekonom klasik seperti Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan output (GNP). Sejalan dengan teori Smith, ekonom David Ricardo juga menganggap bahwa faktor alam bersifat tetap, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan melambat atau bahkan stagnan. Pandangan klasik ini menyatakan bahwa faktor alam, tenaga kerja, dan modal bersifat konstan, sehingga dalam jangka panjang tingkat produksi akan mencapai titik optimal.



2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Dalam teori Neo-Klasik tradisional, pertumbuhan output bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor utama, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, akumulasi modal (tabungan dan investasi), serta perkembangan teknologi (Todaro, 1998). Model pertumbuhan Solow-Swan (1956) menjelaskan bahwa interaksi antara pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (yang dianggap sebagai faktor eksogen) mempengaruhi dinamika perekonomian. Model ini memiliki beberapa asumsi utama, seperti tingkat depresiasi yang dianggap tetap, tidak adanya perdagangan internasional atau pergerakan barang modal, serta tidak adanya sektor pemerintah. Selain itu, pertumbuhan penduduk diasumsikan tetap, dengan seluruh penduduk bekerja sehingga jumlah tenaga kerja sama dengan jumlah penduduk (Pratama dan Manurung, 2008).

2.1.3 Upah Minimum

Upah adalah penerimaan atas hak pekerja yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Besaran upah ditetapkan berdasarkan suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan untuk karyawan dan keluarganya. Dengan demikian, upah berfungsi sebagai balas jasa atas



g dilakukan oleh karyawan kepada pengusaha, dan besarnya disesuaikan dengan produktivitas yang diberikan oleh karyawan (Syam, 2015). Upah minimum memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran tenaga

kerja. Untuk itu Kebijakan terkait upah minimum harus ditetapkan untuk menjamin kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi dalam hal ini tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan yang bisa mengancam keberlanjutan kondisi perekonomian (Nurbayani, 2023). Ada beberapa konsep ekonomi yang membahas tentang tingkat upah yang adil. Upah merupakan sumber utama pendapatan bagi individu, oleh karena itu, upah harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya secara layak. Sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang diberikan oleh pekerja kepada pengusaha, upah diberikan kepada pekerja. Upah juga merupakan elemen penting dalam menentukan harga pokok dalam sebuah perusahaan. Ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah dapat merugikan perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, menurut Mankiw (2006) beberapa faktor penting memengaruhi tingkat upah, antara lain:

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Upah cenderung tinggi untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan memiliki jumlah tenaga kerja yang langka, sementara upah cenderung rendah untuk pekerjaan yang memiliki banyak penawaran tenaga kerja.

2. Organisasi Buruh

Keberadaan dan kekuatan organisasi buruh akan berpengaruh pada tingkat upah. Serikat buruh yang kuat dapat meningkatkan tingkat upah, sedangkan serikat buruh yang lemah cenderung tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah.



3. Kemampuan Pembayaran

Pemberian upah bergantung pada kemampuan pembayaran perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, sehingga kenaikan upah dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan.

4. Produktivitas Kerja

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas kinerja kerja karyawan. Semakin tinggi kinerja kerja karyawan, semakin besar upah yang diterima. Kinerja kerja ini diukur sebagai produktivitas kerja.

5. Biaya Hidup

Di kota-kota besar di mana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya hidup juga menjadi faktor penentu dalam menentukan upah karyawan.

6. Peran Pemerintah

Pemerintah mempengaruhi tingkat upah melalui regulasi. Regulasi upah biasanya menetapkan batas bawah dari tingkat upah yang harus dibayarkan. Dalam pasar tenaga kerja, penetapan upah yang wajar sangat penting. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah bagi tenaga kerja yang harus dibayarkan.

Tujuan utama dari penetapan upah minimum adalah untuk memastikan bahwa standar hidup minimum, termasuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja, terpenuhi. Upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk

pendapatan rendah, khususnya pekerja yang termasuk golongan miskin.

Penetapan upah minimum dapat dibagi menjadi tujuan mikro dan makro. Pada



tingkat mikro, upah minimum bertujuan sebagai jaring pengaman untuk mencegah penurunan upah, mengurangi kesenjangan upah di dalam perusahaan, dan meningkatkan penghasilan pekerja dengan pendapatan terendah. Sementara pada tingkat makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk meratakan pendapatan, meningkatkan daya beli pekerja, memperluas kesempatan kerja, mengubah struktur biaya industri, meningkatkan produktivitas kerja nasional, mengembangkan etos dan disiplin kerja, serta memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan pengusaha dalam konteks hubungan bipartite. Pada awalnya, Departemen Tenaga Kerja secara pusat menetapkan upah minimum untuk berbagai region di seluruh Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan otonomi daerah, mulai tahun 2001, penetapan upah minimum dilakukan oleh masing-masing provinsi. Ketetapan upah minimum merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah, biasanya berdasarkan rekomendasi atau masukan dari komisi pengupahan dan jaminan sosial dari dewan ketenagakerjaan daerah, yang menetapkan bahwa perusahaan harus membayar setidaknya sejumlah upah kepada pekerja dengan tingkat upah terendah (Kertonegoro, 2000).

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat didefinisikan sebagai ukuran proporsi populasi manusia kerja suatu negara atau mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap populasi pada usia kerja. Angkatan kerja jumlah dari orang yang bekerja dan tidak bekerja, sedangkan populasi < usia kerja adalah penduduk di atas usia kerja biasanya 15 tahun keatas



(Resmiati, 2018). Konsep tingkat partisipasi angkatan kerja menurut BPS adalah presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (Labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Menurut mantra (2003) jika semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka semakin tinggi pula angkatan kerja yang sama dalam satu kelompok. Begitu juga sebaliknya. Jika semakin tinggi jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka akan semakin tinggi pula jumlah yang termasuk ke dalam golongan yang bukan angkatan kerja, dan mengakibatkan kecilnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk memahami perkembangan angkatan kerja suatu negara, dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengukur proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. TPAK dinyatakan sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, atau dengan kata lain, menunjukkan ketersediaan orang untuk bekerja. Ketika ketersediaan sumber daya manusia tinggi, hal ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai. Menurut Sumarsono (2009) Beberapa faktor yang mempengaruhi TPAK adalah:



1. Penduduk yang masih berstatus sekolah

Menurut Sumarsono (2009), tingginya jumlah orang yang masih bersekolah akan mengurangi total angkatan kerja, sehingga TPAK juga rendah. Penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas Mutu Sumber Daya Manusia, kondisi keluarga, dan pendapatan keluarga.

2. Penduduk yang mengurus rumah tangga

Semakin banyak anggota keluarga yang beraktivitas mengurus rumah tangga, maka pengaruhnya terhadap TPAK akan kecil.

3. Pendapatan keluarga

Dalam keluarga dengan penghasilan rendah, cenderung sedikit anggota keluarga yang bekerja, sehingga TPAK rendah. Sebaliknya, keluarga dengan biaya hidup tinggi akan mendorong lebih banyak anggota keluarga untuk bekerja, sehingga TPAK meningkat.

4. Kelompok usia

Penduduk usia muda cenderung tidak memiliki tanggung jawab besar dalam mencari nafkah dan biasanya masih bersekolah, sehingga TPAK rendah. Pada kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki yang bertanggung jawab mencari nafkah, TPAK cukup tinggi. Namun, penduduk di atas 55 tahun memiliki kemampuan kerja yang menurun, sehingga TPAK juga rendah.

5. Upah

tingginya upah dapat meningkatkan partisipasi anggota keluarga dalam pasar kerja, sehingga mampu meningkatkan angka TPAK.



6. Tingkat Mutu Sumber Daya Manusia

Semakin tinggi Mutu Sumber Daya Manusia yang diperoleh, semakin banyak peluang kerja yang tersedia. Terutama bagi wanita, tingkat Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi cenderung meningkatkan partisipasi individu dalam dunia kerja. Kondisi ini akan mendorong peningkatan TPAK.

7. Aktivitas perekonomian

Program pembangunan di suatu wilayah membutuhkan keterlibatan semua orang dan pihak terkait untuk mewujudkannya. Adanya program pembangunan dapat memberikan harapan baru yang signifikan dalam mendukung peningkatan partisipasi kerja, sehingga TPAK akan terus meningkat.

2.1.5 Mutu Sumber Daya Manusia

Mutu Sumber Daya Manusia adalah sarana penting untuk mengembangkan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang efektif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dengan mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik sesuai dengan harapan. Sulo (2005) mendefinisikan pendidikan sebagai persiapan tenaga kerja, yaitu kegiatan yang membimbing siswa agar memiliki dasar-dasar yang diperlukan untuk bekerja, meliputi pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang diharapkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan, Pendidikan adalah upaya yang sadar dan terencana



menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa bangkitkan potensi mereka secara aktif, sehingga memiliki kekuatan spiritual,

kendali diri, kepribadian, kecerdasan, karakter mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mutu Sumber Daya Manusia juga dianggap sebagai bentuk investasi dalam sumber daya manusia, sesuai dengan Teori Modal Manusia (Human Capital Theory). Teori Modal Manusia menyatakan bahwa pendidikan memiliki dampak positif terhadap tingkat pengangguran. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang sering diukur dari lamanya waktu yang dihabiskan di bangku sekolah, dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, Mutu Sumber Daya Manusia dianggap sebagai investasi masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan, pada akhirnya, mengurangi angka pengangguran (Husila, 2020). Investasi dalam pendidikan dianggap sebagai upaya yang dapat diukur melalui kualitas sumber daya manusia, di mana setelah menjalani pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk, diharapkan ada peningkatan nilai, seperti kenaikan pendapatan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan manfaat sosial lainnya dibandingkan sebelum menerima pendidikan. Kualitas sumber daya manusia di suatu negara juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, masyarakat akan mampu mengakses Mutu Sumber Daya Manusia yang lebih baik sehingga akan berdampak pada semakin tingginya kualitas sumber daya manusia (Fatmawati,2019).



i era globalisasi yang semakin berkembang, Mutu Sumber Daya Manusia mampu menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja serta memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Dalam dunia pendidikan, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan Mutu Sumber Daya Manusia. Namun, kenyataannya, jika dilihat dari segi kualitas, Mutu Sumber Daya Manusia di Indonesia masih belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah. Mutu Sumber Daya Manusia mencerminkan tingkat kecerdasan atau pencapaian formal penduduk suatu negara. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dicapai seseorang, semakin tinggi pula kapasitas kerja atau produktivitasnya di tempat kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang baik dan upah yang memadai diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran, dengan asumsi ketersediaan lapangan kerja formal. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kualitas seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan. Secara umum, pekerjaan yang bergengsi memerlukan tenaga kerja yang berkualifikasi, profesional, dan sehat untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar perkiraan akumulasi modal manusia yang dimilikinya. Karena modal manusia berhubungan positif dengan tingkat produktivitas, maka dapat disimpulkan bahwa Mutu Sumber Daya Manusia juga memiliki korelasi positif dengan produktivitas.

2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga secara umum dan berkelanjutan. Peningkatan harga hanya pada satu atau dua barang saja tidak dianggap sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut memicu kenaikan harga pada besar barang lainnya. Inflasi muncul ketika terdapat ketidakseimbangan permintaan barang dengan persediaannya, di mana permintaan melebihi



ketersediaan barang. Semakin besar kesenjangan antara permintaan dan persediaan ini, semakin besar pula risiko inflasi terhadap stabilitas ekonomi. Inflasi terjadi jika kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling memengaruhi satu sama lain. Tingkat inflasi yang stabil dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan beberapa cara. Ketika inflasi berada pada tingkat yang rendah dan stabil, hal ini memungkinkan konsumen maupun pelaku usaha untuk melakukan perencanaan jangka panjang secara lebih efektif, meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang nasional, serta mendorong aktivitas perekonomian. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, mengganggu kelancaran kegiatan bisnis, dan pada akhirnya menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi. (Nurbayani,2023).

Inflasi dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, ekspektasi inflasi di masa yang akan datang, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim atau bencana alam. Inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan menurunkan tingkat investasi. Selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan. Pada tahap awal terjadinya inflasi, barang-barang menjadi langka, tetapi di tahap selanjutnya, jumlah barang akan meningkat karena berkurangnya daya beli masyarakat. Secara umum, inflasi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat karena tingkat pendapatan riil juga mengalami penurunan. Pemahaman awal mengenai inflasi lebih berfokus pada nilai riil. Secara umum, tingkat harga dalam perekonomian dapat dilihat dari dua



perspektif: sebagai harga dari berbagai barang dan jasa, atau sebagai ukuran nilai uang itu sendiri. Ketika tingkat harga meningkat, orang perlu membayar lebih untuk mendapatkan barang dan jasa. Di sisi lain, kenaikan tingkat harga juga menunjukkan bahwa nilai uang menurun. Berdasarkan pemahaman tersebut terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menyatakan terjadinya inflasi (Rahardja, 2008), yaitu sebagai berikut:

- Kenaikan harga: Suatu komoditas dianggap mengalami kenaikan harga jika harganya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Bersifat umum: Kenaikan harga pada satu komoditas belum dapat disebut inflasi jika tidak mempengaruhi kenaikan harga secara keseluruhan.
- Berlangsung terus-menerus: Kenaikan harga yang bersifat umum tidak dianggap sebagai inflasi jika hanya terjadi sementara. Oleh karena itu, pengukuran inflasi biasanya dilakukan dalam periode waktu minimal bulanan.

Inflasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh beberapa faktor. Menurut Mulyani (2020) Berikut adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan inflasi:

1. Peningkatan Permintaan (Demand) Inflasi dapat terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan melebihi pasokan yang ada, barang menjadi langka di pasar. Peningkatan permintaan ini bisa berasal dari pasar domestik maupun permintaan ekspor. Selain itu, peningkatan



permintaan dari pemerintah dan sektor swasta juga dapat memicu inflasi.

2. Kenaikan Biaya Produksi Inflasi bisa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Ketika harga bahan baku, bahan bakar, atau upah tenaga kerja meningkat, perusahaan biasanya akan menaikkan harga barang yang mereka jual. Hal ini terjadi karena mereka perlu menutupi biaya produksi yang lebih tinggi, sementara proses produksi barang bisa terhambat akibat keterbatasan sumber daya.
3. Tingginya Peredaran Uang Inflasi juga dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jika terlalu banyak uang beredar sementara pasokan barang relatif tetap, maka harga barang cenderung naik sebagai respons terhadap tingginya permintaan dibandingkan dengan penawaran yang terbatas. Ketidakseimbangan antara jumlah barang dan uang yang beredar inilah yang menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa sembarangan mencetak uang dalam jumlah besar untuk melunasi utang negara dan keperluan lainnya. Peningkatan jumlah uang yang beredar dapat memicu inflasi di negara tersebut.

Teori kurva Philip merupakan teori yang memperlihatkan hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Teori ini dikemukakan A.W Phillips dan pertama kali muncul akibat krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1940-an (Phillips, 1955; Taylor, 1979; dan Barro & Gordon, 2007). Berdasarkan situasi ini, A.W. Phillips mengamati adanya hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Dari pengamatannya, ia



menemukan bahwa terdapat korelasi yang erat antara kedua variabel tersebut, di mana inflasi yang tinggi cenderung diikuti oleh tingkat pengangguran yang rendah. Teori A.W. Phillips menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran berdasarkan asumsi bahwa inflasi mencerminkan peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat meningkat, permintaan meningkat dan harga meningkat berdasarkan teori permintaan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ketika harga sedang tinggi (inflasi), produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan produksi) (Lubis, 2017).

Ketika harga (inflasi) naik karena peningkatan permintaan tenaga kerja, tingkat pengangguran turun. Menurut Dernburg dan Karyaman Muchtar (1992), inflasi dapat berhubungan langsung dengan tingkat pengangguran yang terjadi. Hal ini terlihat dari hubungan antara tingkat inflasi (upah) dengan tingkat pengangguran yang ditunjukkan oleh kurva Phillips. Kurva Phillips awalnya memberikan gambaran kasar tentang kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran diperkirakan terkait dengan pasar tenaga kerja yang ketat, tingkat pendapatan yang tinggi, dan permintaan konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gambaran mengenai pilihan (trade-off) antara pengangguran dan inflasi. Jika target yang diinginkan tingkat inflasi rendah, maka pengangguran akan sangat tinggi. Sebaliknya, jika target yang diinginkan tingkat inflasi tinggi, maka pengangguran akan relatif rendah. Namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang tinggi memiliki dampak negatif. Tingginya menyebabkan harga barang dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan impor (Hasan 2018). Hal ini mendorong masyarakat untuk memilih barang



impor yang relatif lebih murah dibandingkan barang lokal. Harga yang lebih tinggi membuat daya saing barang domestik di pasar internasional menurun, yang pada gilirannya menekan nilai ekspor dan meningkatkan impor. Kurangnya daya saing harga barang dan jasa domestik menurunkan permintaan terhadap produk lokal. Beberapa pengusaha akhirnya mengurangi produksi, yang kemudian berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan bagi sejumlah pekerja.

Para ekonom berpendapat bahwa inflasi yang terlalu tinggi menjadi pertanda awal resesi ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga, yang berisiko menimbulkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Akibatnya, angka pengangguran akan semakin meningkat.

2.2 Hubungan Antara Variabel

2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan melalui Hukum Okun. Hukum ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan GDP. Artinya, ketika GDP meningkat, tingkat pengangguran akan menurun. Sebaliknya, jika GDP tidak tumbuh, maka tingkat pengangguran cenderung stagnan atau bahkan meningkat sekitar 1,5% dibandingkan kondisi sebelumnya (Mankiw, 2006). Arthur Okun juga mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab pengangguran dapat dikaitkan dengan output. Output

sebagai indikator dalam melihat peluang kerja. Jika output suatu wilayah di atas tingkat potensialnya, maka kesempatan kerja akan meningkat,



sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan atau bahkan berkurang. Secara teori, setiap pertumbuhan ekonomi yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur melalui perubahan PDRB suatu daerah, karena PDRB menjadi indikator yang berkaitan langsung dengan tingkat pengangguran (Alghofari, 2010).

2.2.2 Hubungan Antara Upah Minimum dengan Pengangguran

Tingkat upah mempunyai pengaruh positif terhadap pengangguran, dimana kenaikan tingkat upah menyebabkan peningkatan biaya produksi dan dengan demikian meningkatkan harga produk. Kenaikan harga suatu produk mendapat respon negatif dari konsumen, sehingga konsumen mengurangi pembeliannya. Kondisi ini memaksa produsen untuk mengurangi produksi dan dampaknya adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan pada akhirnya meningkatkan pengangguran.

2.2.3 Hubungan Antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan Pengangguran

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Menurut Amir Amri (2007), terdapat hubungan negatif antara angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Peningkatan angkatan kerja yang tidak disertai dengan perluasan lapangan kerja menyebabkan



an lapangan pekerjaan yang sangat minim, sehingga penyerapan tenaga menjadi tidak maksimal dan tingkat pengangguran pun bertambah seiring meningkatnya angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur

proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

2.2.4 Hubungan Antara Mutu Sumber Daya Manusia dengan Pengangguran

Semakin tinggi tingkat Mutu Sumber Daya Manusia seseorang, semakin besar kapasitas dan peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan. Orang yang memiliki Mutu Sumber Daya Manusia tinggi biasanya memiliki lebih banyak keterampilan atau pengetahuan yang dapat meningkatkan peluang kerja dan mengurangi risiko pengangguran.

2.2.5 Hubungan Antara Inflasi dengan Pengangguran

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran dengan mengasumsikan bahwa inflasi mencerminkan peningkatan permintaan agregat. Ketika permintaan agregat meningkat, teori permintaan menjelaskan bahwa kenaikan permintaan akan diikuti oleh kenaikan harga. Untuk memenuhi permintaan tersebut akibat inflasi yang tinggi, produsen akan meningkatkan kapasitas produksi dengan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Kenaikan harga (inflasi) ini akan mengurangi tingkat pengangguran karena meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja.

2.3 Tinjauan Empiris



ndiarta (2013), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat nimum (X1), inflasi (X2), dan jumlah penduduk (X3) terhadap tingkat

pengangguran (Y) yang terjadi di Kota Malang dari tahun 1996 hingga 2013. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel UMK (Tingkat Upah Minimum) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, variabel Inflasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Secara simultan, variabel UMK, inflasi, dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Triwahyuningtyas (2022), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angkatan Kerja (X1), Mutu Sumber Daya Manusia (X2), Upah Minimum (X3), Produk Domestik Bruto (PDB) (X4), Pengangguran (Y). Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 hingga 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Metode yang digunakan adalah Analisis regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel angkatan kerja, Mutu Sumber Daya Manusia, upah minimum, dan produk domestik bruto berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Secara parsial, variabel angkatan kerja, Mutu Sumber Daya Manusia, dan upah minimum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan produk domestik bruto tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.



idayat (2023) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel IPM (X1), UMP (X2) dan TPAK (X3) secara parsial terhadap TPT

dan mengetahui bagaimana pengaruh variabel IPM, UMP dan TPAK secara simultan terhadap TPT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil dari penelitian ini ialah Variabel IPM berpengaruh negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, variabel UMP berpengaruh positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. dan Variabel TPAK berpengaruh positif dan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Sedangkan secara simultan seluruh variabel independen yakni IPM, UMP, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

Manurung (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1), inflasi (X2) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (X3) terhadap pengangguran (Y) di Sumatera Utara periode 2009-2020 (studi kasus: kota medan, kota pematang siantar, kota padang sidempuan dan kota sibolga) baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Teknik Analisis data yang digunakan ialah analisis regresi data panel (time series dan cross section). Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, variabel inflasi berpengaruh secara negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, variabel TPAK berpengaruh secara negatif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran. Sedangkan secara simultan



pertumbuhan ekonomi, inflasi dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

Khotimah (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat Mutu Sumber Daya Manusia (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), angkatan kerja (X3), dan upah minimum (X4) terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015 baik secara parsial maupun simultan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder dari 5 kabupaten/kota di DIY tahun 2009-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dengan analisis regresi data panel. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Mutu Sumber Daya Manusia, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Tingkat Mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Secara simultan tingkat Mutu Sumber Daya Manusia, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Tanur (2022) penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh wilayah urban terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. Model analisis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis regresi linier berganda. Dalam

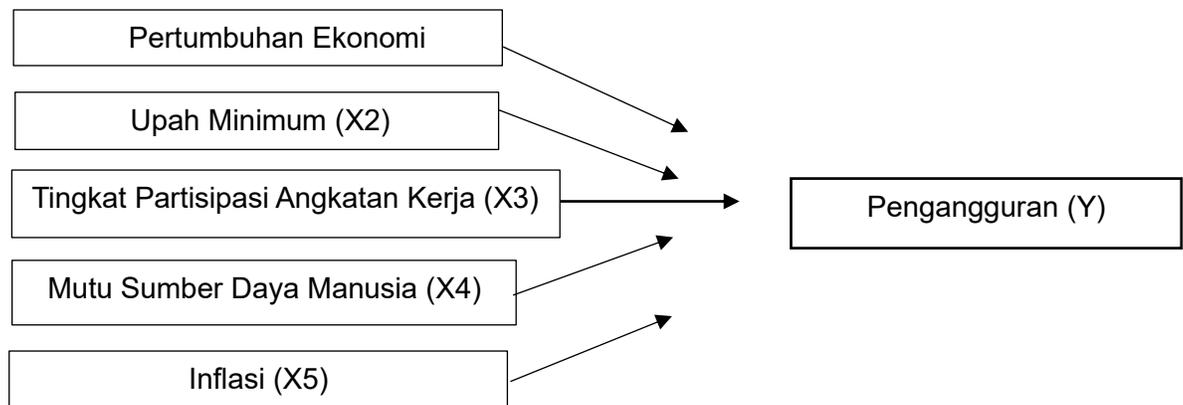


regresi linier berganda, variabel-variabel independen seperti persentase < urban, rata-rata lama sekolah, pusat perdagangan, dan sarana akomodasi n untuk memprediksi variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase penduduk urban, rata-rata lama sekolah, pusat perdagangan, dan sarana akomodasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial, variabel persentase penduduk urban, pusat perdagangan, dan sarana akomodasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pengangguran di kota makassar dan variabel independen yaitu jumlah penduduk, upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja, inflasi, dan tingkat Mutu Sumber Daya Manusia. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas dasar pemikiran dalam penelitian ini, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara atas rumusan Masalah. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kota Makassar.
2. Diduga upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran di Kota Makassar
3. Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Kota Makassar.
4. Diduga Mutu Sumber Daya Manusia berpengaruh negative terhadap pengangguran di Kota Makassar
5. Diduga inflasi berpengaruh negative terhadap pengangguran di Kota Makassar

